

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

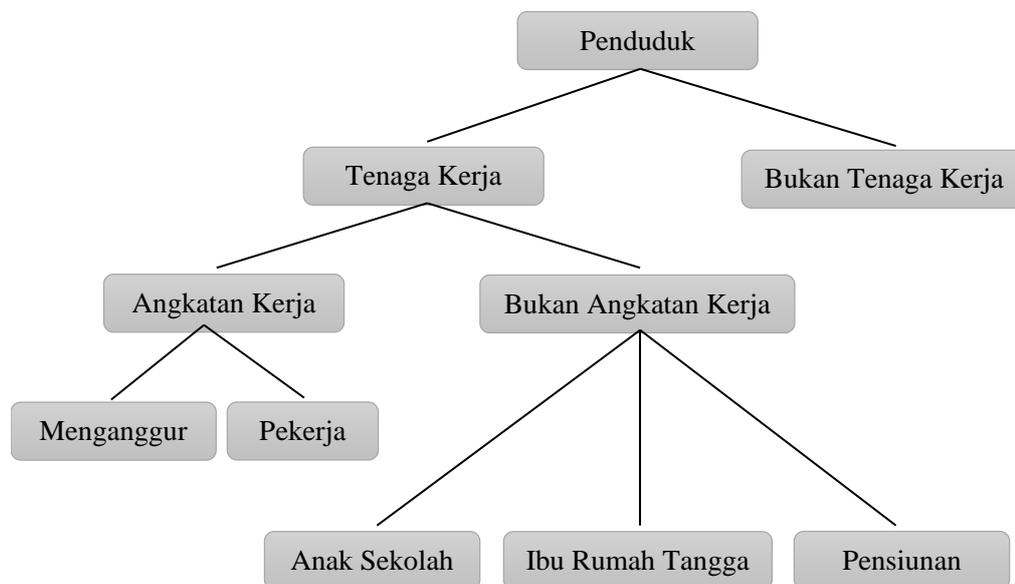
Pada bab ini akan disajikan tinjauan pustaka yang melandasi kerangka pemikiran dan pengujian hipotesis. Penulisan bab II ini akan disajikan sebagai berikut, yang pertama yaitu tinjauan pustaka untuk menggambarkan konsep dari variabel yang diteliti, yang kedua yaitu penelitian terdahulu. Selanjutnya membahas tentang kerangka hipotesis yang menjelaskan tentang model variabel, lalu diikuti dengan hipotesis penelitian untuk diuji kebenarannya.

2.1.1 Tenaga Kerja

2.1.1.1 Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atas jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat dan merupakan modal bagi bergeraknya perekonomian negara. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 pasal 3 ayat 2, yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja (15 tahun ke atas).

Pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan hanya oleh batas umur. Maka komposisi penduduk dan tenaga kerja dapat dilihat dalam sajian pada Gambar 2.1 sebagai berikut:



Sumber: Simanjuntak, 1998

Gambar 2.1 Komposisi Penduduk dan Tenaga Kerja

Beberapa konsep ketenagakerjaan yang berlaku secara umum menurut Nainggolan (dalam Pattimahu, 2015):

1. Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja (berusia 15 tahun ke atas) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.
2. Angkatan kerja (*labour force*) adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produksi barang dan jasa, maka yang merupakan angkatan kerja adalah penduduk yang kegiatan utamanya selama seminggu yang lalu bekerja (K) dan penduduk yang sedang mencari pekerjaan (MP). Angkatan kerja yang masuk kategori bekerja apabila minimum bekerja selama 1 jam selama seminggu lalu untuk kegiatan

produktif sebelum pencacahan dilakukan. Mencari pekerjaan adalah seseorang yang kegiatan utamanya sedang mencari pekerjaan dan belum bekerja minimal 1 jam selama seminggu yang lalu. Penjumlahan angka angkatan kerja dalam bahasa ekonomi disebut sebagai penawaran angkatan kerja (*labour supply*). Sedangkan penduduk yang berstatus sebagai pekerja atau tenaga kerja termasuk ke dalam sisi permintaan (*labour demand*).

3. Bukan angkatan kerja (*unlabour force*) adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, namun kegiatan utama selama seminggu yang lalu adalah sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Apabila seseorang yang sekolah, mereka ingin bekerja minimal 1 jam selama minggu yang lalu, tetapi kegiatan utamanya adalah sekolah, maka individu tersebut tetap termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja. Mereka tercatat lainnya jumlahnya tidak sedikit dan mungkin sebagian besar masuk ke dalam transisi antara sekolah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau dalam kategori bukan angkatan kerja (BAK).
4. Tingkat partisipasi angkatan kerja (*labour force participation rate*) adalah menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umur sebagai persentase penduduk dalam kelompok umur tersebut, yaitu membandingkan angkatan kerja dengan tenaga kerja.
5. Tingkat pengangguran (*unemployment rate*) adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja sedang aktif mencari pekerjaan, yaitu membandingkan jumlah orang yang mencari

pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja. Jumlah orang yang bekerja tergantung dari besarnya permintaan (*demand*) dan lapangan pekerjaan yang tersedia di dalam masyarakat. Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh kegiatan perekonomian dan tingkat upah. Besar penempatan (jumlah orang yang bekerja atau tingkat *employment*) dipengaruhi oleh faktor kekuatan penyediaan dan permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah.

2.1.1.2 Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja adalah jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat baik yang telah ditempati maupun jumlah lapangan kerja yang masih kosong (permintaan tenaga kerja). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja, kesempatan kerja adalah lowongan pekerjaan yang diisi oleh pencari kerja dan pekerja yang sudah ada. Oleh karena itu, perluasan kesempatan kerja merupakan upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerja baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia.

2.1.1.3 Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah terserapnya tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerjaan (lapangan pekerjaan) untuk diisi oleh para pencari kerja.

Menurut menurut Todaro dan Smith (2003) penyerapan tenaga kerja merupakan penerimaan tenaga kerja untuk melakukan tugas pekerjaan atau suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan pekerjaan untuk siap diisi oleh

para pencari pekerjaan. Secara umum penyerapan tenaga kerja tersebut menunjukkan seberapa besar suatu perusahaan dalam menyerap tenaga kerja untuk menghasilkan suatu produk. Menurut Kuncoro (2002) penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan pekerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja.

Permintaan tenaga kerja secara umum merupakan jumlah orang yang dibutuhkan untuk bekerja dalam suatu perusahaan maupun dalam proses produksi. Penyerapan tenaga kerja pada dasarnya tergantung dari besar kecilnya permintaan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja secara umum menunjukkan besarnya kemampuan suatu perusahaan menyerap sejumlah tenaga kerja untuk menghasilkan suatu produk. Kemampuan untuk menyerap tenaga kerja besarnya tidak sama antara sektor satu dengan sektor yang lain (Sumarsono, 2003).

Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor, namun tiap sektor mengalami pertumbuhan dan berbeda demikian juga tiap sektor berbeda dalam menyerap tenaga kerja. Perbedaan laju pertumbuhan tersebut mengakibatkan dua hal, yaitu:

- a. Terdapat perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja masing-masing sektor.

- b. Secara berangsur-angsur terjadi perubahan sektoral, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun dalam kontribusinya terhadap pendapat nasional.

2.1.2 Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja pada dasarnya tergantung dari besar kecilnya permintaan tenaga kerja. Menurut Sumarsono (2003) elastisitas merupakan ukuran derajat kepekaan jumlah permintaan akan sesuatu terhadap perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Dalam ilmu ekonomi elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Besar kecilnya elastisitas permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor yang memungkinkan substitusi tenaga kerja dipengaruhi oleh faktor produksi lainnya, elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan dan elastisitas persediaan dari faktor produksi pelengkap lainnya. Semakin kecil Permintaan akan sesuatu dapat berupa barang, tenaga kerja, produksi dan lain-lain. Besarnya permintaan akan barang, tenaga kerja, produksi dapat dipengaruhi oleh sesuatu faktor penentu misalnya harga, produksi, upah, modal dan lain-lain.

1. Elastisitas Permintaan

Elastisitas permintaan (*elasticity of demand*) adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Sedangkan besar kecilnya perubahan tersebut dinyatakan dalam

koefisien elastisitas atau angka elastisitas yang disingkat E, yang dinyatakan dengan rumus berikut ini:

$$Ed = \frac{\Delta Q}{\Delta P} = \frac{P}{Q} \text{ atau } Ed = \frac{\% \Delta Q}{\% \Delta P}$$

Keterangan:

ΔQ = perubahan jumlah permintaan

ΔP = perubahan harga barang

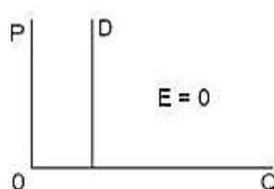
P = harga mula-mula

Q = jumlah permintaan mula-mula

Ed = elastisitas permintaan

Berdasarkan besar kecilnya tingkat koefisien elastisitas permintaannya, elastisitas permintaan dapat dibedakan menjadi lima macam yaitu:

a. Permintaan Inelastis Sempurna ($Ed = 0$)



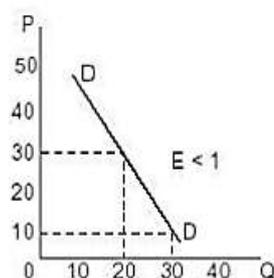
Sumber: Sukirno, 2003

Gambar 2.2 Kurva Permintaan Inelastis Sempurna

Permintaan inelastis sempurna terjadi jika tidak ada perubahan jumlah yang diminta meskipun ada perubahan harga, atau $\Delta Q_d = 0$, meskipun ΔP ada. Secara matematis $\% \Delta Q_d = 0$, berapapun $\% \Delta P$. Dengan kata lain perubahan harga sebesar apapun sama sekali tidak berpengaruh terhadap jumlah yang diminta. Kasus permintaan inelastis sempurna terjadi bila konsumen dalam dalam membeli barang tidak lagi memperhatikan

harganya, melainkan lebih memperhatikan pada seberapa besar kebutuhannya. Contoh: pembelian garam dapur oleh suatu keluarga atau pembelian obat ketika sakit. Konsumen membeli garam atau obat lebih mempertimbangkan berat butuhnya, bukan pada berat harganya.

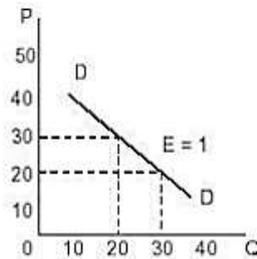
b. Permintaan Inelastis ($E_d < 1$)



Sumber: Sukirno, 2003

Gambar 2.3 Kurva Permintaan Inelastis

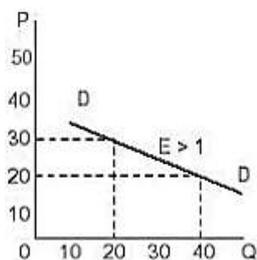
Permintaan inelastis kalau perubahan harga kurang begitu berpengaruh terhadap perubahan kuantitas barang yang diminta. Dengan kata lain kalau presentasi perubahan jumlah yang diminta relatif lebih kecil dibanding presentasi perubahan harga. Secara matematis $\% \Delta Q_d < \% \Delta P$. Permintaan inelastis atau sering disebut permintaan yang tidak peka terhadap harga, misal harga berubah naik 10% maka perubahan permintaannya akan turun kurang dari 10%. Elastisitas permintaan kurang dari satu biasanya terjadi pada barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, pupuk, bahan bakar dan lain-lain.

c. Permintaan Elastis Uniter ($E_d = 1$)

Sumber: Sukirno, 2003

Gambar 2.4 Kurva Permintaan Elastis Uniter

Permintaan elastis uniter adalah kalau perubahan harga pengaruhnya sebanding terhadap perubahan kuantitas barang yang diminta. Dengan kata lain presentasi perubahan jumlah yang diminta sama dengan persentase perubahan harga. Jadi kalau harga berubah turun sebesar 10% maka kuantitas yang diminta juga akan berubah dalam hal ini akan naik sebesar 10%. Secara matematis $\% \Delta Q_d = \% \Delta P$. Permintaan yang elastis uniter atau elastis proporsional atau yang E_d tepat = 1 sulit ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun terjadi sebenarnya hanyalah secara kebetulan.

d. Permintaan Elastis ($E_d > 1$)

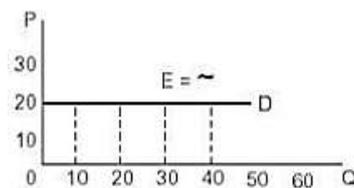
Sumber: Sukirno, 2003

Gambar 2.5 Kurva Permintaan Elastis

Permintaan elastis kalau perubahan harga pengaruhnya cukup besar terhadap perubahan kuantitas barang yang diminta. Dengan kata lain

persentase perubahan jumlah yang diminta relatif lebih besar dari persentase perubahan harga. Jadi kalau harga turun 10%, maka kuantitas barang yang diminta akan mengalami kenaikan lebih dari 10%. Secara matematis $\% \Delta Q_d > \% \Delta P$. Permintaan yang elastis atau peka terhadap harga ($E_d > 1$) dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terjadi pada barang-barang mewah, seperti mobil, alat-alat elektronik, pakaian pesta dan lain-lain.

- e. Permintaan Elastis Sempurna ($E_d = \infty$)



Sumber: Sukirno, 2003

Gambar 2.6 Kurva Permintaan Elastis Sempurna

Permintaan elastis sempurna terjadi jika ada perubahan jumlah yang diminta meskipun tidak ada perubahan harga atau $\Delta Q_d = \text{ada perubahan}$, meskipun $\Delta P = 0$ (tidak ada perubahan harga). Secara matematis $\% \Delta Q_d = \text{Ada}$, $\% \Delta P = 0$. Kasus permintaan elastis sempurna terjadi apabila permintaan suatu barang dapat berubah-ubah meskipun harga barang tersebut tetap. Contoh kasus ini bisa terjadi pada berbagai produk, yang jelas kalau permintaan akan produk tersebut bisa berubah-ubah walaupun harga produk itu tetap.

2.1.3 Industri

2.1.3.1 Pengertian Industri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang perindustrian, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancangan dan perancangan industri. Pengertian industri juga meliputi semua perusahaan yang mempunyai kegiatan tertentu dalam mengubah secara mekanik atau secara kimia bahan-bahan organis sehingga menjadi hasil baru.

Industri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Selain itu industrialisasi juga tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Menurut Sandi (2010) industri adalah usaha untuk memproduksi barang jadi dengan bahan baku atau bahan mentah melalui proses produksi penggarapan dalam jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh secara definisi ada beberapa pengertian dengan harga serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi-tingginya.

Pembangunan industri secara nyata harus menjadi penggerak utama peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan sekaligus dapat menjadi penyedia lapangan kerja yang sudah mulai tidak tertampung pada sektor pertanian. Menurut Winardi (2000) industri adalah usaha produktif terutama dalam bidang produksi

atau perusahaan tertentu yang menyelenggarakan jasa-jasa misalnya transportasi dan hubungan yang mempergunakan modal tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Maka perluasan kesempatan kerja salah satunya dapat dicapai dengan jalan meluaskan kegiatan ekonomi, untuk itu harus mencapai dengan usaha meningkatkan produktivitas baik di bidang kegiatan yang baru maupun di bidang tradisional.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Industri

Jumlah dan jenis-jenis industri berbeda-beda untuk setiap daerah atau negara tergantung pada sumber daya yang tersedia dan dimiliki. Semakin maju negara tersebut, maka semakin beragam pula kegiatan produksinya. Menurut Abdurachmat dan Maryani (1997) jenis industri berdasarkan sifat bahan mentah dan sifat produksinya, jenis produksi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- a. Industri Primer, yaitu industri-industri yang mengolah bahan mentah hasil produksi sektor primer baik dari pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, maupun pertambangan. Industri ini pada umumnya lebih berorientasi kepada bahan mentah dan ditempatkan.
- b. Industri Sekunder, yaitu industri-industri yang mengolah lebih lanjut hasil-hasil industri lain (industri primer) bahan bakunya adalah barang jadi atau setengah jadi yang diproduksi industri lain. Pada umumnya ditempatkan berdekatan dengan industri-industri yang menghasilkan bahan bakunya.

2.1.3.3 Klasifikasi Industri

1. Klasifikasi berdasarkan jumlah tenaga kerja
 - a. Industri rumah tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 4 orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Misalnya: industri anyaman, industri kerajinan, industri tempe, industri tahu dan industri makanan ringan.
 - b. Industri kecil, yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5 sampai 19 orang. Ciri industri kecil adalah memiliki modal yang relatif kecil, tenaga kerjanya berasal dari lingkungan sekitar atau masih ada hubungan saudara. Misalnya industri genteng, industri bata dan industri pengolahan rotan.
 - c. Industri sedang, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20 sampai 99 orang. Ciri industri sedang adalah memiliki modal yang cukup besar, tenaga kerja memiliki keterampilan tertentu dan pimpinan perusahaan memiliki kemampuan manajerial tertentu. Misalnya industri konveksi, industri bordir dan industri keramik.
 - d. Industri besar, yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Ciri industri besar adalah memiliki modal besar yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk kepemilikan saham, tenaga kerja harus memiliki keterampilan khusus dan pimpinan perusahaan dipilih melalui

uji kemampuan dan kelayakan. Misalnya industri tekstil, industri mobil, industri besi baja dan industri pesawat terbang.

2. Klasifikasi berdasarkan bahan baku

Setiap industri memerlukan atau membutuhkan bahan baku, untuk melakukan proses produksi. Tiap-tiap industri membutuhkan bahan baku yang berbeda tergantung pada apa yang akan dihasilkan dari proses produksi industri tersebut. Berdasarkan bahan baku yang digunakan industri dapat dibedakan menjadi:

- a. Industri ekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam. Misalnya: industri hasil pertanian, industri hasil perikanan dan industri hasil kehutanan.
- b. Industri non ekstraktif, yaitu industri yang mengolah lebih lanjut hasil-hasil industri lain. Misalnya; industri kayu lapis, industri pemintalan dan industri kain.
- c. Industri fasilitatif atau disebut juga industri tertier. Kegiatan industrinya adalah dengan menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain. Misalnya; perbankan, perdagangan, angkutan dan pariwisata.

3. Klasifikasi berdasarkan hasil produksi

Berdasarkan produksi yang dihasilkan industri dapat dibedakan menjadi:

- a. Industri primer, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang tidak perlu pengolahan lebih lanjut. Barang atau benda yang dihasilkan tersebut dapat dinikmati atau digunakan secara langsung.

Misalnya: industri anyaman, industri konveksi, industri makanan dan minuman.

- b. Industri sekunder, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sebelum dinikmati atau digunakan. Misalnya: industri pemintalan benang, industri ban, industri baja dan industri tekstil.
- c. Industri tersier, yaitu industri yang hasilnya tidak berupa barang atau benda yang dapat dinikmati atau digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung, melainkan berupa jasa layanan yang dapat mempermudah atau membantu kebutuhan masyarakat. Misalnya: industri angkutan, industri perbankan, industri perdagangan dan industri pariwisata.

4. Klasifikasi berdasarkan lokasi unit usaha

Industri pada umumnya memiliki sebuah kantor atau kedudukan lokasi, tentu saja keberadaan industri sangat berpengaruh terhadap tujuannya dan dimana memposisikan diri. Berikut ini klasifikasi industri berdasarkan lokasi unit usaha sebagai berikut:

- a. Industri berorientasi pada pasar (*market-oriented industry*), yaitu industri yang didirikan dekat dengan konsumen, sebagai contoh industri makanan dan minuman.
- b. Industri berorientasi pada tenaga kerja (*employment-oriented industry*), yaitu industri yang didirikan dengan tujuan dapat menyerap banyak

tenaga kerja terutama mereka yang memiliki pendidikan rendah.

Industri semacam ini adalah konveksi dan lain sebagainya.

- c. Industri berorientasi pada pengolahan (*supply-oriented industry*), yaitu perusahaan atau industri yang didirikan dekat dengan sumber pengolahan sehingga lebih mendapatkan pasokan suplai.
- d. Industri berorientasi pada bahan baku (*materials-oriented industry*), yaitu industri yang didirikan di tempat tersedianya bahan baku. Misalnya: industri konveksi berdekatan dengan industri tekstil, industri pengalengan ikan berdekatan dengan pelabuhan laut dan industri gula berdekatan lahan tebu.
- e. Industri yang tidak terikat oleh persyaratan yang lain (*footloose industry*), yaitu sebuah industri yang tidak terikat dengan persyaratan yang telah disebutkan di atas. Industri ini dapat didirikan di mana saja, karena bahan baku, tenaga kerja dan pasalnya sangat luas serta dapat ditemukan di mana saja. Misalnya: industri elektronik, industri otomotif dan industri transportasi.

5. Klasifikasi berdasarkan barang yang dihasilkan

Berdasarkan barang yang dihasilkan industri dapat dibedakan menjadi:

- a. Industri berat, yaitu industri yang menghasilkan mesin-mesin atau alat produksi lainnya. Misalnya: industri alat-alat berat, industri mesin dan industri percetakan.

- b. Industri ringan, yaitu industri yang menghasilkan barang siap pakai untuk dikonsumsi. Misalnya industri obat-obatan, industri makanan dan industri minuman.

6. Klasifikasi berdasarkan subjek pengelola

Berdasarkan subjek pengelolanya, industri dapat dibedakan menjadi:

- a. Industri rakyat, yaitu industri yang dikelola dan merupakan milik rakyat, industri ini menggunakan modal sendiri dan atas nama rakyat baik milik perorangan maupun milik kelompok. Misalnya industri makanan ringan dan industri kerajinan
- b. Industri negara, yaitu industri yang dikelola dan merupakan milik negara yang dikenal dengan istilah BUMN. Misalnya: industri kertas, industri pupuk, industri baja, industri pertambangan, industri perminyakan dan industri transportasi.

7. Klasifikasi industri berdasarkan cara pengorganisasian

Cara pengorganisasian suatu industri yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti: modal, tenaga kerja, produk yang dihasilkan dan pemasarannya. Berdasarkan cara pengorganisasiannya industri dapat dibedakan menjadi:

- a. Industri kecil, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri modal relatif kecil, teknologi sederhana, pekerjanya kurang dari 10 orang biasanya dari kalangan keluarga, produknya masih sederhana dan lokasi pemasarannya masih terbatas (berskala lokal). Misalnya: industri kerajinan dan industri makanan ringan.

- b. Industri menengah, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri modal relatif besar, teknologi cukup maju tetapi masih terbatas, pekerjaan antara 10 sampai 200 orang, tenaga kerja tidak tetap dan lokasi pemasarannya relatif lebih luas (berskala regional). Misalnya: industri bordir, industri sepatu dan industri mainan anak-anak.
- c. Industri besar, yaitu industri memiliki ciri-ciri modal sangat besar, teknologi canggih dan modern, organisasi teratur, tenaga kerja dalam jumlah banyak dan terampil pemasarannya berskala nasional atau internasional. Misalnya: industri barang-barang elektronik, industri otomotif, industri transportasi dan industri persenjataan.

2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun. Dalam penyusunan PDRB diperlukan data dari berbagai kegiatan ekonomi yang berasal dari berbagai sumber. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, distribusi dan akumulasi kekayaan. Menurut Arsyad (1992) PDRB adalah sejumlah nilai tambah produksi yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu daerah atau regional. Menurut BPS, produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan penjumlahan nilai *output* bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten/kota) dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender). Kegiatan ekonomi yang

dimaksud adalah kegiatan pertanian, pertambangan, industri manufaktur, sampai dengan jasa.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam satu periode tertentu adalah data produk domestik regional bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (*netto*) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga berlaku pada suatu tahun tertentu sebagai dasar.

Indikator yang paling penting dari kemajuan perekonomian suatu negara atau daerah adalah melalui pencapaian tingkat produk domestik bruto (PDB) untuk tingkat nasional dan produk domestik regional bruto (PDRB) untuk tingkat daerah setiap tahun (Boediono, 1999). Menurut Wahyudi (2010) pertumbuhan ekonomi di suatu daerah berkaitan dengan kenaikan produksi suatu negara atau kenaikan pendapatan perkapita suatu negara. Di dalam suatu daerah pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari pendapatan produk domestik regional bruto (PDRB). Apabila PDRB naik maka penyerapan tenaga kerja meningkat karena tenaga kerja berperan penting terhadap kenaikan *output* produksi semakin banyak tenaga kerja yang digunakan dan proses produksi akan meningkatkan nilai *output* produksi.

Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran:

1. Pendekatan Produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
2. Pendekatan Pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
3. Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan stok dan (5) ekspor neto, (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

2.1.5 Investasi

2.1.5.1 Pengertian Investasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), investasi adalah penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Sementara secara umum investasi adalah meluangkan atau memanfaatkan waktu uang atau tenaga demi keuntungan atau manfaat pada masa datang. Investasi dapat dilakukan oleh individu maupun badan usaha seperti perusahaan.

Menurut Sukirno (2003) investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti atau menambah barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan, dengan perkataan lain investasi adalah kegiatan pembelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. Investasi bertujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Dengan kata lain investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian dan untuk meningkatkan kapasitas produksi yang lebih tinggi diperlukan pula modal manusia mencukupi (Sukirno, 2003).

2.1.5.2 Jenis Investasi

Menurut Dewi dan Vijaya (2018) investasi terdiri dari beberapa jenis yaitu:

1. Investasi kekayaan riil, yaitu investasi pada aset nampak atau nyata. Misalnya: tanah, gedung dan bangunan.
2. Investasi kekayaan pribadi yang tampak, yaitu investasi pada benda pribadi. Misalnya: emas, berlian dan barang antik.
3. Investasi keuangan, yaitu investasi surat berharga seperti deposito, saham dan obligasi.
4. Investasi komoditas, yaitu investasi pada komoditas barang seperti kopi dan kelapa sawit.

2.1.5.3 Tujuan Investasi

Investasi bertujuan untuk dapat mempertahankan kapasitas produksi yang telah dicapai sebelumnya. Aset tetap seperti peralatan, mesin, kendaraan dan bangunan dalam jangka waktu yang lama ketika telah melampaui umur ekonomisnya tentu akan mengalami penurunan kemampuan dalam menghasilkan jasa atau hasil produksi. Apabila investasi tidak dilakukan, maka kapasitas produksi dalam jangka panjang tentu akan mengalami penurunan dan akan berakibat pada pesanan pelanggan yang tidak dapat terpenuhi (Riyanto, 2008). Sedangkan menurut Mulyadi (2001) salah satu tujuan investasi adalah untuk menambah kapasitas produksi menjadi lebih besar dari sebelumnya. Ada beberapa pertimbangan yang diperlukan untuk melakukan investasi ini di antaranya adalah apakah laba di masa yang akan datang serta pengambilan investasi (*return on investment*) yang akan diperoleh dengan melakukan investasi tersebut jumlahnya memadai serta perlu untuk mempertimbangkan faktor risiko yang berbeda-beda untuk setiap investasi yang memerlukan aliran kas (*cash flow*) di masa yang akan datang.

Menurut Tandelilin (2010) secara khusus terdapat beberapa alasan seseorang melakukan investasi, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa akan datang.

2. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilik perusahaan atau objek lain, seseorang dapat memindahkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi.
3. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.

Menurut Dewi dan Vijaya (2018) dalam mencapai suatu efektivitas dan efisien dalam keputusan investasi maka diperlukan ketegasan pada tujuan yang diharapkan antara lain:

1. Terciptanya keberlanjutan dalam investasi tersebut
Dengan adanya perolehan *capital gain* dan pembagian dividen, diharapkan investasi akan dilakukan secara terus-menerus dengan harapan investasi yang dilakukan oleh investor merupakan suatu keputusan dalam melakukan investasi jangka panjang.
2. Terciptanya profit yang maksimal
Dengan adanya pemasukan dana pada suatu perusahaan yang diperoleh melalui investor, diharapkan dapat memaksimalkan laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan dalam kegiatan operasinya.
3. Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham
Para pemegang saham akan memperoleh dividen dari laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan.

4. Pemberian andil bagi pembangunan bangsa

Dengan adanya investasi dari investor, diharapkan dana yang diterima perusahaan dari investor akan dimaksimalkan dalam memperoleh laba operasi perusahaan. Melalui laba tersebut maka perusahaan akan membahayakan misalkan pajak yang diperoleh.

5. Mengurangi tekanan inflasi

Menghindari dari resiko penurunan kekayaan atau hak milik akibat pengaruh dari inflasi

6. Dorongan untuk menghemat pajak

Dorongan bagi tumbuhnya investasi di masyarakat dengan memberikan fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi.

2.1.6 Unit Usaha

Dalam ilmu ekonomi, perusahaan dibedakan antara pengertian perusahaan dan unit usaha. Unit usaha adalah jenis usaha, tempat memproduksi atau membuat barang dan bertanggung jawab terhadap hasilnya disebut juga pabrik. Sedangkan perusahaan lebih menitikberatkan pada semua pengelolaan usaha, termasuk keuangan, produksi dan pemasaran.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), unit usaha adalah unit yang melakukan kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan dan mempunyai kewenangan yang ditunjukkan berdasarkan kebenaran lokasi bangunan fisik dan wilayah operasinya. Secara umum pertumbuhan unit usaha suatu sektor dalam hal ini industri kecil menengah dan besar pada suatu daerah akan menambah jumlah lapangan pekerjaan.

Menurut Azis Prabowo (dalam Nurafuah, 2015) jumlah unit usaha mempunyai pengaruh yang positif terhadap permintaan tenaga kerja, artinya jika unit usaha suatu industri ditambah maka permintaan tenaga kerja juga bertambah. Semakin banyak jumlah perusahaan atau unit usaha yang berdiri maka akan semakin banyak untuk terjadi penambahan tenaga kerja (Azis Prabowo, 1997 dalam Nurafuah, 2015).

2.1.7 Teori Upah

Berikut ini adalah beberapa teori upah yang melatarbelakangi pembentukan harga upah tenaga kerja:

1. Teori upah alami (*natural wage*)

Disebut juga teori upah normal adalah upah yang besarnya bergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar. Upah alami merupakan upah yang dipakai sebagai acuan agar pekerja hidup layak.

2. Teori upah besi

Upah yang diterima pekerja merupakan upah minimal sehingga pengusaha dapat meraih laba yang sebesar-besarnya, karena pekerja berada dalam posisi yang lemah maka mereka tidak dapat berbuat apa-apa dan terpaksa menerima upah tersebut, oleh karena itu upah ini disebut juga upah besi. Selanjutnya untuk memperbaiki kehidupan, para pekerja disarankan agar mendirikan koperasi-koperasi produksi supaya terlepas dari cengkaman upah besi.

3. Teori upah produktivitas batas kerja

Menjelaskan bahwa tingkat upah memiliki kecenderungan sama dengan tingkat produktivitas tenaga kerja terakhir yang dibayar, yang disebut “pekerja batas” (*marginal worker*), yang berarti upaya yang diberikan kepada pekerja tidak dapat melebihi tingkat produktivitas batas kerja dari pekerja.

4. Teori upah etika

Menurut teori ini, upah yang diberikan kepada pekerja seharusnya sepadan dengan beban pekerjaan yang telah dilakukan pekerja dan mampu membiayai pekerjaan sehingga hidup dengan layak.

5. Teori upah diskriminasi

Teori ini menyatakan bahwa upah yang diberikan kepada pekerja tidaklah sama, tetapi sengaja dibedakan (diskriminasi) bagi setiap pekerja. Perbedaan upah dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya adalah jenis kelamin, ras (warna kulit), tingkat pendidikan, tingkat keterampilan dan jenis pekerjaan.

2.1.7.1 Pengertian Upah

Menurut Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan kerja, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan

dilakukan. Dalam pengertian teori ekonomi, upah yaitu pembayaran yang diperoleh berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada pengusaha (Sukirno, 2002).

Upah yang diberikan oleh para pengusaha secara teoritis dianggap sebagai harga dari tenaga yang dikorbankan pekerja untuk kepentingan produksi. Sehubungan dengan hal itu maka apa yang diterima pekerja dapat dibedakan dua macam yaitu:

- a. Upah Nominal, yaitu sejumlah upah yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh para pekerja
- b. Upah Riil, yaitu kemampuan upah nominal yang diterima oleh para pekerja jika ditukarkan dengan barang dan jasa yang diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang bisa didapatkan dari pertukaran tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan atau balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah tenaga kerja yang diberikan tergantung pada biaya keperluan hidup minimum pekerjaan dan keluarganya, peraturan perundang-undang yang mengikat tentang upah minimum regional (UMR), produktivitas marginal tenaga kerja, tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha dan perbedaan jenis pekerjaan.

2.1.7.2 Upah Minimum

Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan setiap tahun sebagai jaring pengaman di suatu wilayah. Upah minimum menjadi batas bawah nilai upah karena aturan melakukan pengusaha membayar upah pekerjanya lebih rendah dari upah minimum. Upah minimum dapat ditetapkan di provinsi atau sering kita dengar dengan sebutan upah minimum provinsi atau ditetapkan di kabupaten/kota disebut dengan upah minimum kabupaten/kota.

Menurut pasal 23 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, upah minimum sebagaimana dimaksud merupakan upah bulanan terendah, terdiri atas:

1. Upah tampak tunjangan; atau
2. Upah pokok dan tunjangan tetap; atau
3. Dalam hal komponen upah di perusahaan terdiri atas upah pokok-pokok dan ternyata tidak tetap, pokok paling sedikit sebesar upah minimum.

Latar belakang ditetapkannya upah minimum adalah dimaksudkan sebagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan pekerja, dimana upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman agar tidak ada nilai upah yang lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Tidak hanya itu, upah minimum juga melindungi dan menjamin kelangsungan usaha dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja produktif.

2.1.7.3 Fungsi Upah

Upah ditetapkan atas dasar tugas yang diberikan pemberi kerja dan dikerjakan tenaga kerja dengan memperhatikan keseimbangan prestasi, kebutuhan

tenaga kerja dan kemampuan perusahaan dalam menetapkan tingkat upah prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban pemberi kerja dan tenaga kerja harus diperhatikan. Dengan demikian, pemberi kerja mempunyai tanggung jawab untuk membayar upah tetap pada waktunya.

Upah merupakan faktor utama bagi tenaga kerja karena digunakan untuk membiayai kehidupan tenaga kerja beserta keluarganya. Imam Soepomo (dalam Trimaya, 2014) mengatakan bahwa pada hakikatnya fungsi dari upah, yaitu:

1. Mewujudkan keadilan sosial dalam rangka manusiakan manusia;
2. Pemenuhan kebutuhan dasar yang minimal bagi tenaga kerja pada tingkat dimana hidup layak dari hasil pekerjaan yang dilakukan; dan
3. Mendorong peningkatan disiplin dan produktivitas kerja.

Menurut Imam Soepomo (dalam Trimaya, 2014) tujuan tenaga kerja melakukan pekerjaan adalah untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupannya bersama dengan keluarganya yaitu penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Menurut Mochtar Halim (dalam Trimaya, 2014) fungsi upah itu berbeda-beda, tergantung dari sudut mana upah itu dilihat, sebagai berikut ini:

1. Dari sudut pandang tenaga kerja, upah berfungsi sebagai kebutuhan hidup yang layak bersama keluarganya.
2. Dari sudut pandang pemberi kerja, upah berfungsi sebagai unsur penggerak dalam proses produksi dan merupakan biaya produksi dari perusahaan.

3. Dari sudut pada pemerintah, upah merupakan tolak ukur hidup masyarakat. Oleh karena itu perumusan upah harus dapat menciptakan iklim usaha yang harmonis, serasi, mantap, tenteram dan dinamis.

2.1.7.4 Penetapan Upah Minimum

1. Pemerintah

Penetapan upah minimum ditetapkan oleh gubernur sebagai kepala daerah dengan mempertimbangkan rekomendasi dewan pengupahan provinsi. Peraturan pemerintah tentang pengupahan telah menjelaskan mengenai perhitungan upah menggunakan formula sebagai berikut:

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi}_t + \% \Delta PDB_t)\}$$

Keterangan:

- UM_n adalah upah minimal yang akan ditetapkan.
- UM_t adalah upah minimal tahun berjalan.
- Inflasi t adalah inflasi yang dihitung dari bulan September tahun sebelumnya hingga bulan September tahun berjalan.
- ΔPDB_t adalah pertumbuhan produk domestik regional bruto pada periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan kuartal I dan II tahun berjalan

2. Perusahaan

Setelah upah minimum ditetapkan oleh pemerintah maka para pengusaha dalam pemberian upah kepada pekerja/buruhnya harus dengan ketetapan upah minimum tersebut. Mengingat kondisi perusahaan yang satu dengan yang lainnya sangat berlainan, maka para

pengusaha dalam melaksanakan ketentuan upah minimum juga berlainan. Berdasarkan struktur skala upah yang dilakukan secara umum oleh perusahaan sebagai berikut:

- Ditetapkan dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi.
- Penentuannya dilakukan oleh pengusaha berdasarkan kemampuan perusahaan dan upah minimum yang berlaku.
- Ditinjau secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.

3. Pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh

Peran serikat pekerja dalam penetapan upah minimum yaitu serikat pekerja menjadi wakil dari anggotanya, hal ini diperlukan apabila pekerja tidak mempunyai kemampuan dalam melakukan negosiasi, perundingan atau penetapan keputusan dalam tingkat upah, jam kerja, kondisi kerja dan masalah keamanan kerja. Serikat pekerja mempunyai kekuatan *bargaining* dalam menentukan perundingan kolektif dengan perusahaan guna mendapatkan kesepakatan dalam penetapan upah minimum serta bersedia mendukung manajemen untuk mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum kepada pemerintah.

2.1.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang

akan dilakukan penulis. Penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan dan memperkuat asas hasil analisis yang dilakukan. Ringkasan penelitian terdahulu terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1.	Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Barat (Rahmawati, 2022)	- PDRB - Upah Minimum - Unit Usaha	- Investasi	PDRB dan UMK mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan. Unit Usaha mempunyai pengaruh yang positif tidak signifikan.	Repositori DSpace UII Yogyakarta, http://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/38370 .
2.	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah (Pangastuti, 2015)	- PDRB - Upah	- Penganggu ran - PAD - Investasi - Unit Usaha	Upah dan PAD mempunyai pengaruh positif tidak signifikan. Pengangguran mempunyai pengaruh positif signifikan. PDRB mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan.	<i>Economics Development Analysis Journal</i> , Vol. 4, No. 2 (2015).
3.	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri Pengolahan di Sulawesi Selatan Periode 2006-2015 (Adil, 2017)	- Investasi - Upah	- Belanja Pemerintah - PDRB Unit - Usaha	Belanja Pemerintah mempunyai pengaruh positif signifikan. Investasi mempunyai pengaruh positif tidak signifikan. Upah mempunyai	Repositori UIN Alauddin Makassar, http://repositori.uin-alauddin.ac.id/eprint/6735 .

No.	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
				pengaruh negatif signifikan.	
4.	Analisis Pengaruh Investasi PMA, PMDN, Nilai Produksi dan Unit Usaha terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur di Provinsi Jawa Timur (L. K. Dewi dan Gunawan, 2018)	- Unit Usaha	- Investasi PMA - Investasi PMDN - Nilai Produksi	Investasi Asing PMA mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan. Investasi PMDN dan Unit Usaha mempunyai pengaruh positif signifikan. Nilai Produksi mempunyai pengaruh negatif signifikan.	Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 3 No 02 (2018).
5.	Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah (Nunung, 2018)	- PDRB - Upah - Unit Usaha	- Angkatan Kerja - Investasi	Unit Usaha dan Angkatan Kerja mempunyai pengaruh positif signifikan. Upah dan PDRB mempunyai pengaruh positif tidak signifikan.	Repositori DSpace UII Yogyakarta, https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11641/ JURNAL.
6.	Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Putri, 2021)	- PDRB - Upah	- IPM - Investasi - Unit Usaha	PDRB, Upah dan IPM berpengaruh tidak signifikan.	Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Vol. 9, No. 2.

No.	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
7.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri dan Perdagangan di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Idham dan Satrianto, 2018)	- PDRB	- Tingkat Pendidikan - Tingkat Kesehatan - Investasi - Unit Usaha - Upah	PDRB, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Kesehatan mempunyai pengaruh positif signifikan.	Jurnal <i>EcoGen</i> , Volume 1, Nomor 3, 5 September 2018.
8.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan (Fajar, 2020)	- Upah	- Produktivitas Tenaga Kerja - Modal - PDRB - Investasi - Unit Usaha	Upah, Produktivitas Tenaga Kerja dan Modal mempunyai pengaruh positif tidak signifikan.	<i>Digital Library:</i> Unismuh Makassar, https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/12939-Full_Text .
9.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri Pengolahan Provinsi Sulawesi Selatan (Caya, 2019)	- Unit Usaha - Upah	- PDRB - Investasi	Unit Usaha dan Upah mempunyai pengaruh positif signifikan.	<i>Digital Library:</i> Unismuh Makassar, https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/8743-Full_Text .
10.	Pengaruh Jumlah Industri dan Kapasitas Produksi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Blitar (Mahendra, 2013)	- Unit Usaha	- Kapasitas Produksi - PDRB - Investasi - Upah	Jumlah unit usaha mempunyai pengaruh negatif signifikan. Kapasitas Produksi mempunyai pengaruh positif signifikan.	Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Vol. 1, No. 2.

No.	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
11.	Pengaruh Jumlah Unit Usaha dan Upah Minimum Regional terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Bantaeng Tahun 2001-2015 (Handayani, 2016)	- Unit Usaha - Upah	- PDRB - Investasi	Jumlah unit usaha mempunyai pengaruh positif tidak signifikan. Upah mempunyai pengaruh positif signifikan.	Repositori UIN Alauddin Makassar, http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/9898 .
12.	Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi dan Upah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Sulawesi Utara (V.Melansena dkk., 2021)	- PDRB - Investasi - Upah	- Unit Usaha	PDRB dan Investasi mempunyai pengaruh positif tidak signifikan. Upah mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 21, No. 7.
13.	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum Kota (UMK) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Hartono dkk., 2018)	- PDRB - Upah	- Investasi - Unit Usaha	PDRB mempunyai pengaruh positif signifikan. Upah mempunyai pengaruh positif tidak signifikan.	INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen, Vol. 14, No. 1.
14.	Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2013 (Purnami, 2015)	- Upah	- Tingkat Pendidikan - PDRB - Investasi - Unit Usaha	Tingkat pendidikan dan Upah mempunyai pengaruh yang signifikan.	<i>Institutional Repository</i> UIN Syarif Hidayatullah, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30167/ .

No.	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
15.	Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah (Rochmani dkk., 2016)	- Upah - Unit Usaha	- LPE - PDRB - Investasi	Secara parsial UMK dan LPE mempunyai pengaruh positif. Secara parsial jumlah unit usaha tidak berpengaruh. Secara simultan LPE, UMK dan jumlah unit usaha berpengaruh.	Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan (JIEP), Vol. 16, No. 2 (2016).

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah konsep untuk mengungkapkan dan menentukan persepsi dan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti dengan teori-teori yang telah dipaparkan dalam tinjauan pustaka. Mengacu pada teori yang ada maka garis besar penelitiannya ini yaitu melihat hubungan antara PDRB, investasi, jumlah unit usaha sektor industri serta upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.

2.2.1 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Penyerapan Tenaga Kerja

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Salah satu manfaat dari PDRB adalah untuk mengetahui tingkat produk neto atau nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh faktor industri, laju pertumbuhan ekonomi dan pola struktur

perekonomian pada satu periode tertentu pada suatu negara dan/atau daerah yang biasanya pada satu tahun.

Rakhmasari (dalam Indradewa dan Natha, 2015) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja salah satunya adalah PDRB dan memiliki hubungan positif yang selanjutnya diperkuat oleh hasil penelitian Idham dan Satrianto (2018) yang mengatakan semakin meningkatnya PDRB akan semakin meningkat pula jumlah penyerapan tenaga kerja. Manusia merupakan salah satu faktor penting dalam proses produksi sehingga dapat dikatakan bahwa penyerapan tenaga kerja akan meningkat jika *output* juga meningkat sehingga perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan indikator PDRB.

Terbentuknya komponen kesempatan bekerja bagi semua penduduk akan membawa pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara ataupun suatu daerah dilihat dari tingkat pendapatan perkapita masyarakat itu sendiri, semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh masyarakat maka semakin baik pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal tersebut disebabkan apabila pendapatan masyarakat semakin meningkat maka pertumbuhan belanja investasi akan meningkat pula.

Dalam teori Harrod-Domar (dalam Todaro dan Smith, 2006) untuk menumbuhkan suatu perekonomian dibutuhkan pembentukan modal sebagai tambahan stok modal. Pembentukan modal tersebut dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Hal tersebut menuntut adanya investasi untuk

menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian sebagai “*engine of growth*”. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan pada umumnya didukung oleh peningkatan ekspor dan investasi.

Peningkatan nilai PDRB pada sektor-sektor ekonomi yang ada akan dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja yang akan tersedia. Dengan adanya pengembangan dan peningkatan sektor-sektor ekonomi akan mendorong terbukanya lapangan kerja yang baru melalui pendapatan perkapita itu sendiri, sehingga PDRB memiliki hubungan yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

2.2.2 Hubungan Investasi dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Dalam teori ekonomi, investasi berarti kegiatan pembelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. Secara umum investasi meliputi penambahan barang dan jasa dalam masyarakat seperti penambahan mesin-mesin baru, pembuatan jalan baru, lahan baru dan sebagainya. Investasi tidak hanya untuk memaksimalkan *output* tetapi untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi.

Teori yang dikemukakan oleh Harrod-Domar (dalam Harnita dkk., 2020) yang menyatakan bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan tenaga kerja tetapi juga dapat memperbesar kapasitas produksi. Hal tersebut karena dengan adanya investasi maka ini dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja karena investasi yang banyak akan mampu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja.

Investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi, investasi dapat menjadi titik tolak bagi keberhasilan penghasilan dan keberlanjutan pembangunan di masa depan karena dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat yang pada gilirannya akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian menurut V. Melansena dkk., (2021) bahwa tinggi rendahnya investasi mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, meningkatkan investasi akan memiliki potensi menciptakan dan menyerap tenaga kerja sektor industri, sehingga investasi memiliki hubungan yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

2.2.3 Hubungan Jumlah Unit Usaha dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu dan mempunyai catatan administrasi itu sendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.

Secara umum, pertumbuhan unit usaha suatu sektor dalam hal ini sektor industri pada suatu daerah akan menambah jumlah lapangan pekerjaan. Hal ini berarti permintaan tenaga kerja juga bertambah. Hubungan jumlah unit usaha dengan tenaga kerja yang terserap telah dibuktikan oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh L. K. Dewi dan Gunawan (2018), yang mengatakan apabila jumlah unit usaha naik maka penyerapan tenaga kerja mengalami kenaikan, semakin meningkatnya unit usaha maka perusahaan-perusahaan industri akan memperbanyak unit usaha atau akan ada perusahaan-perusahaan baru yang pada

akhirnya membutuhkan tenaga kerja atau menciptakan lapangan kerja baru. Maka didapat kesimpulan bahwa jumlah unit usaha berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

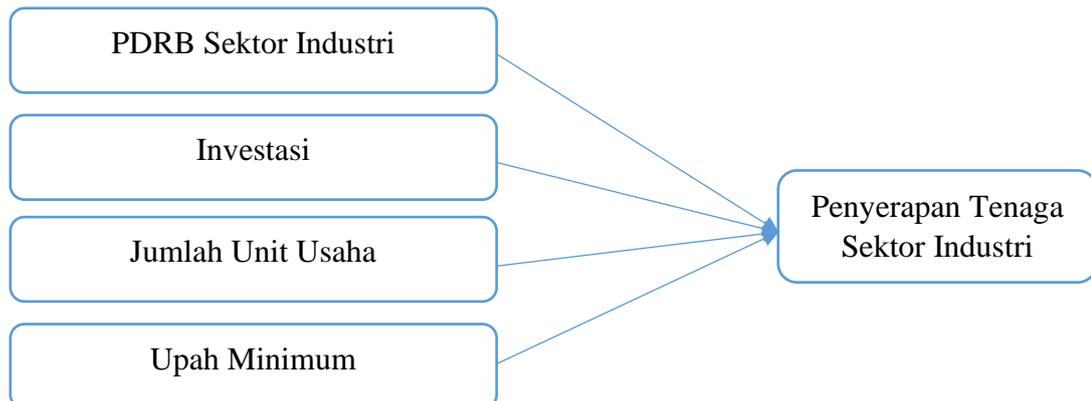
2.2.4 Hubungan Upah Minimum dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Upah dalam arti sempit khusus dipakai untuk tenaga kerja yang bekerja pada orang lain dalam hubungan kerja sebagai karyawan atau buruh. Menurut teori efisiensi upah dan teori produksi, upah merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja melalui mekanisme *spillover effect*, kenaikan upah minimum akan mempengaruhi kenaikan upah pekerja tetap.

Peningkatan upah yang terus meningkat secara langsung akan membawa dampak signifikan pada penawaran tenaga kerja, karena dengan adanya tingkat upah yang bertambah pengusaha akan berupaya untuk meningkatkan unit usaha atau jumlah unit usahanya sehingga dengan adanya penambahan unit usaha, pengusaha akan menambah jumlah tenaganya.

Penelitian yang dilakukan oleh Saputri dan Rejekiningsih (2008) mengatakan bahwa upah minimum kabupaten atau kota (UMK) memiliki pergerakan yang relatif stabil dan ditentukan oleh Tripartit (pengusaha, serikat pekerja dan pemerintah). Selain itu, dimungkinkan adanya kinerja yang aktif dari serikat pekerja yang tidak hanya melindungi pekerja tetapi juga memperhatikan hidup pengusaha, sehingga ada hubungan yang baik antara serikat kerja dan pengusaha. Maka upah berpengaruh positif karena upah dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja, karena upah juga dinilai dapat mendorong tenaga kerja untuk lebih produktif.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut bahwa PDRB, investasi, jumlah unit usaha sektor industri serta upah minimum mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Secara jelasnya mengenai kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat dari Gambar 2.7.



Gambar 2.7 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah dibahas sebelumnya, maka hipotesis dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial PDRB, investasi, jumlah unit usaha sektor industri dan upah minimum berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.
2. Diduga secara bersama-sama PDRB, investasi, jumlah unit usaha sektor industri dan upah minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.